Implementasi Program Manajemen Aset Di Lingkungan Universitas Riau

[1]Eka Desnyarti, [2]Adianto, [3]Mayarni
[1,2,3]Universitas Riau
Korespondensi: ekadesnyarti2301248811@student.unri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Pengelolaan aset merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya dalam menjamin tertib administrasi, akuntabilitas, dan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercermin dari kepatuhan aparatur terhadap prosedur pengelolaan aset, pelaksanaan kegiatan administrasi dan penatausahaan secara rutin, serta adanya koordinasi antara pimpinan, pengelola aset, dan operator pada masing-masing unit kerja. Pemanfaatan sistem informasi juga mendukung proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Namun, implementasi program masih menghadapi sejumlah hambatan, meliputi keterbatasan kapasitas dan kesinambungan sumber daya manusia, kompleksitas administrasi dan penggunaan beberapa aplikasi, keterlambatan proses penghapusan aset, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, penyederhanaan prosedur administrasi, penguatan koordinasi antarunit, integrasi sistem informasi, dan peningkatan sarana pendukung. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan manajemen aset tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, efektivitas sistem administrasi, dan koordinasi organisasi.

***Kata kunci**: Implementasi Program; Manajemen Aset; Barang Milik Negara; Universitas Riau*

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the asset management program at Universitas Riau and identify the factors that support and hinder its implementation. Asset management plays an important role in supporting higher education institutions, particularly in ensuring administrative compliance, accountability, and the optimal utilization of State-Owned Assets. This study employed a qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that the asset management program at Universitas Riau has generally been implemented in accordance with applicable regulations. This is reflected in the compliance of personnel with asset management procedures, the routine implementation of administrative and asset administration activities, and coordination among institutional leaders, asset managers, and operators across work units. The use of information systems also supports asset recording, inventory management, and reporting processes. However, the implementation of the program continues to face several challenges, including limited human resource capacity and continuity, administrative complexity and the use of multiple applications, delays in asset disposal procedures, and inadequate supporting facilities and infrastructure. Therefore, improvements are needed in personnel competencies through continuous training, simplification of administrative procedures, strengthening inter-unit coordination, integration of information systems, and enhancement of supporting facilities. This study emphasizes that successful asset management is determined not only by compliance with regulations but also by human resource capacity, administrative system effectiveness, and organizational coordination.

***Keyword:** Program Implementation; Asset Management; State-Owned Assets; Universitas Riau*

1. PENDAHULUAN

Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. BMN sebagai bagian dari kekayaan negara harus dikelola secara tertib agar keberadaan, jumlah, nilai, dan kondisinya dapat diketahui secara pasti serta dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan BMN yang baik tidak hanya berkaitan dengan pengamanan aset negara, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, efektivitas penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban institusi terhadap kekayaan negara yang berada dalam penguasaannya. Hal ini menjadi semakin penting bagi perguruan tinggi negeri yang memiliki aset dengan jumlah dan jenis yang beragam, mulai dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan laboratorium, kendaraan operasional, hingga sarana dan prasarana pendidikan lainnya.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas pengelolaan aset negara, pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan dan BMN melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SIMAN merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan BMN secara elektronik, sedangkan SAKTI merupakan aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pada instansi pemerintah. Pemanfaatan kedua sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan pencatatan, mempercepat proses administrasi, mempermudah pemantauan aset, serta menghasilkan informasi BMN yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara normatif, pelaksanaan penatausahaan BMN memiliki landasan hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menegaskan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga atas pengelolaan barang milik negara yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 memberikan landasan mengenai pengelolaan BMN secara tertib dan bertanggung jawab. Secara lebih khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mengatur pelaksanaan penatausahaan BMN yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi setiap instansi pemerintah, termasuk perguruan tinggi negeri, dalam melaksanakan penatausahaan aset secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penatausahaan BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 mencakup tiga kegiatan utama. Pertama, pembukuan, yaitu kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam daftar barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi yang telah ditetapkan. Kegiatan ini meliputi pencatatan barang yang diperoleh melalui pembelian, hibah, maupun perolehan sah lainnya, termasuk perubahan kondisi, mutasi, dan penghapusan barang. Kedua, inventarisasi, yaitu kegiatan pendataan, pencocokan, dan pemeriksaan BMN untuk mengetahui keberadaan, jumlah, kondisi, serta nilai barang yang sebenarnya. Ketiga, pelaporan, yaitu kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan BMN berdasarkan hasil pembukuan dan inventarisasi sesuai dengan periode serta ketentuan yang berlaku. Ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menghasilkan informasi aset yang akurat. Apabila salah satu kegiatan tidak dilaksanakan secara optimal, maka akan berpengaruh terhadap kualitas informasi dan pertanggungjawaban pengelolaan BMN.

Dalam konteks perguruan tinggi negeri, Universitas Riau merupakan salah satu institusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan penatausahaan BMN. Aset yang dimiliki dan digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memerlukan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Berdasarkan data Bagian Umum dan BMN

Universitas Riau, nilai aset yang tercatat pada tahun 2023 mencapai Rp3.411.311.268.791, sedangkan pada akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp3.880.629.725.202. Peningkatan nilai aset tersebut menunjukkan besarnya tanggung jawab institusi dalam memastikan seluruh aset tercatat, terinventarisasi, terpelihara, dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya nilai aset juga menuntut adanya sistem pengawasan dan pengendalian yang memadai agar tidak terjadi kehilangan, ketidaksesuaian pencatatan, maupun penggunaan aset yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Meskipun demikian, penerapan sistem digital dalam penatausahaan BMN di lingkungan Universitas Riau masih menghadapi sejumlah permasalahan. Berdasarkan data evaluasi internal Bagian Umum dan BMN Universitas Riau tahun 2023, dari 64 unit kerja yang memiliki kewajiban pelaporan aset, hanya sekitar 58% yang menyampaikan laporan secara tepat waktu dan sesuai standar. Selain itu, masih ditemukan aset yang belum memiliki identitas atau label inventaris secara lengkap, barang yang belum tercatat dalam sistem, serta pencatatan aset yang dilakukan lebih dari satu kali. Permasalahan lainnya adalah ketidaksesuaian antara data aset yang terdapat dalam sistem dengan kondisi fisik di lapangan, aset yang mengalami kerusakan tetapi belum diproses penghapusannya, serta keterlambatan penyampaian laporan dari beberapa unit kerja. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penerapan sistem informasi pengelolaan BMN dengan pelaksanaannya di tingkat unit kerja.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan organisasi dalam mengoperasikan sistem digital. Berdasarkan survei internal terhadap 110 responden di lingkungan Universitas Riau, hanya 41% responden yang memahami prosedur penatausahaan BMN sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016. Sebanyak 39% responden belum pernah mengikuti pelatihan teknis terkait penggunaan SIMAN maupun SAKTI, sedangkan sekitar 47% menyatakan sering mengalami kendala akses atau kesalahan sistem ketika menggunakan aplikasi tersebut. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan penerapan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kompetensi pengguna, dukungan organisasi, koordinasi antarunit kerja, serta ketersediaan sarana pendukung. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi harus disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan mekanisme pengawasan agar tujuan penatausahaan BMN dapat tercapai.

Permasalahan implementasi program dalam organisasi pemerintahan juga telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Suwito (2019), melalui penelitian berjudul *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai*, menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Smith. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi target yang telah ditentukan. Selanjutnya, Kristianti dalam penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Sei Lakam Timur Kecamatan Karimun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan indikator implementasi Van Meter dan Van Horn. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan pada tingkat lokal dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Astuti mengenai implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di kawasan Kota Pekalongan dengan menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Sementara itu, Fiky Indra (2017) dalam penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan rumah susun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik melalui pelaksanaan wewenang dan koordinasi antarorganisasi. Penelitian Mesi Sulastri (2021) mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

menggunakan teori Ripley dan Franklin. Penelitian tersebut menguraikan tahapan implementasi program, mulai dari sosialisasi hingga perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian implementasi kebijakan telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan dan model implementasi, baik pada bidang perumahan, permukiman, maupun program pembangunan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan di tingkat organisasi maupun masyarakat. Namun, berdasarkan penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus berfokus pada implementasi program manajemen aset negara melalui penggunaan SIMAN dan SAKTI pada perguruan tinggi negeri, khususnya Universitas Riau. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk memahami implementasi program manajemen aset tidak hanya dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari proses pelaksanaan, kemampuan organisasi, kesiapan sumber daya manusia, serta koordinasi antarunit kerja dalam penatausahaan BMN.

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses menerjemahkan kebijakan yang telah ditetapkan ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007) menjelaskan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan. Sementara itu, pendekatan implementasi kebijakan dapat dilihat melalui perspektif *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menekankan pentingnya kejelasan kebijakan dan kepatuhan pelaksana terhadap aturan yang ditetapkan, sedangkan pendekatan *bottom-up* memperhatikan peran aktor pelaksana dan kondisi nyata di tingkat lokal. Kedua pendekatan tersebut relevan untuk memahami pelaksanaan program manajemen aset di Universitas Riau karena keberhasilan program tidak hanya bergantung pada regulasi pemerintah pusat, tetapi juga pada kemampuan dan keterlibatan unit kerja sebagai pelaksana penatausahaan BMN.

Selain itu, manajemen aset merupakan proses yang mencakup pengambilan keputusan terkait perolehan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelepasan aset untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Kaganova & McKellar, 2011, sebagaimana dikutip dalam Lu, 2011). Dalam perspektif manajemen aset strategis, pengelolaan aset harus terintegrasi dengan tujuan organisasi sehingga aset yang dimiliki dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan (Gavrikova et al., 2020). Oleh karena itu, pengelolaan BMN di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada tertib administrasi, tetapi juga harus mampu mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena permasalahan penatausahaan BMN di Universitas Riau menunjukkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem informasi belum sepenuhnya menjamin optimalnya pelaksanaan program. Diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan penatausahaan BMN diterapkan oleh pengelola dan unit kerja, bagaimana sistem SIMAN dan SAKTI digunakan dalam mendukung proses administrasi aset, serta bagaimana kondisi organisasi memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Rencana pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian terhadap proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN, disertai identifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Hasil pengkajian tersebut selanjutnya digunakan untuk memahami upaya perbaikan yang dapat dilakukan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antarunit kerja, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi, dan meningkatkan pengawasan terhadap aset negara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan BMN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif

deskriptif dengan berpedoman pada kajian implementasi kebijakan dan manajemen aset sebagaimana diuraikan dalam tinjauan pustaka. Analisis penelitian diarahkan pada proses pelaksanaan program, keterlibatan aktor pelaksana, kemampuan organisasi, serta pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian implementasi program manajemen aset di lingkungan perguruan tinggi negeri dengan menempatkan penggunaan SIMAN dan SAKTI sebagai bagian dari proses transformasi digital penatausahaan BMN. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak mengkaji implementasi kebijakan pada bidang perumahan dan permukiman, penelitian ini secara khusus mengkaji keterkaitan antara kebijakan pengelolaan aset, pelaksanaan administrasi BMN, pemanfaatan sistem informasi, dan kapasitas organisasi dalam satu lingkungan institusi pendidikan tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan dan manajemen aset publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Universitas Riau dalam meningkatkan kualitas tata kelola BMN agar lebih tertib, transparan, efisien, dan akuntabel.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat eksplanatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi program penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Riau, termasuk pengalaman, persepsi, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman secara komprehensif terhadap fenomena berdasarkan kondisi alamiah dan konteks sosial yang melingkupinya.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Riau, dengan cakupan unit kerja pada tingkat universitas maupun fakultas yang memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan aset dan penatausahaan BMN. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan jabatan, pengetahuan, dan keterlibatan mereka dalam pelaksanaan penatausahaan BMN. Informan berjumlah sepuluh orang yang terdiri atas unsur pimpinan fakultas, pejabat pengelola, kepala bagian, ketua kelompok kerja, serta operator aset dan persediaan. Pemilihan informan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dari berbagai tingkatan organisasi sehingga implementasi program dapat dikaji secara menyeluruh.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelaksanaan penatausahaan BMN, yang mencakup prosedur pengelolaan aset, kepatuhan aparatur terhadap ketentuan yang berlaku, proses administrasi, pembagian tugas dan sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi, koordinasi antarunit kerja, serta kendala dalam pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumen pengadaan barang dan jasa, dokumen penatausahaan BMN, dokumen perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kebijakan internal Universitas Riau, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan BMN.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangannya secara terbuka. Observasi dilakukan secara partisipatif pasif, yaitu peneliti mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan dan penatausahaan BMN tanpa terlibat dalam kegiatan yang diamati. Selanjutnya, dokumentasi dilakukan

dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi yang relevan untuk melengkapi dan memperkuat informasi hasil wawancara serta observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan. Pertama, kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi berdasarkan fokus penelitian. Kedua, penyajian data (*data display*), yaitu menyusun informasi dalam bentuk uraian naratif, matriks, tabel, dan kutipan hasil wawancara untuk memudahkan identifikasi pola serta hubungan antartemuan. Ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), yaitu menginterpretasikan temuan penelitian dan melakukan pemeriksaan secara berkelanjutan untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kondisi empiris.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki kedudukan dan tanggung jawab berbeda dalam pengelolaan BMN. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, diharapkan hasil penelitian mampu memberikan gambaran yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai implementasi program penatausahaan BMN di lingkungan Universitas Riau

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Manajemen Aset di Lingkungan Universitas Riau

1. Tingkat Kepatuhan Aparatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparatur dalam implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau secara umum telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek kepatuhan terhadap prosedur pengadaan, kelengkapan dokumen administrasi, pencatatan, dan inventarisasi Barang Milik Negara (BMN). Kepatuhan tersebut tercermin dari pelaksanaan pengadaan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kewajiban setiap aset yang telah diterima untuk dicatat ke dalam sistem pengelolaan aset. Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan aparatur tidak hanya diwujudkan melalui pemahaman terhadap regulasi, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab administratif yang memastikan setiap aset dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Heru Purnomo selaku PPK LPMPP dan FMIPA Universitas Riau:

"Setiap proses pengadaan kami laksanakan berdasarkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Setelah pengadaan selesai, kami menyerahkan dokumen pendukung seperti berita acara serah terima dan kelengkapan lainnya kepada operator SIMAN untuk dilakukan pencatatan aset." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan BMN telah diterapkan melalui mekanisme administrasi yang menghubungkan proses pengadaan dengan pencatatan aset. Penyerahan dokumen dari PPK kepada operator aset menjadi bagian penting dalam membangun kesinambungan proses administrasi, sehingga aset yang telah diperoleh tidak berhenti pada tahap penerimaan barang, tetapi dilanjutkan dengan proses pencatatan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kepatuhan aparatur merupakan bagian integral dari keseluruhan siklus pengelolaan aset.

Temuan tersebut diperkuat oleh keterangan Ozia Rahman Zhusto selaku Operator Aset LPMPP Universitas Riau yang menyatakan:

"Kepatuhan aparatur diwujudkan dengan memastikan setiap barang yang sudah diterima segera dicatat dalam sistem pengelolaan aset. Semua dokumen harus lengkap dan proses pencatatan harus dilakukan sesuai ketentuan agar keberadaan aset dapat ditelusuri kapan saja." (Wawancara, 9 Mei 2026).

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa kepatuhan aparatur pada tingkat operasional diwujudkan melalui ketepatan waktu pencatatan, kelengkapan dokumen, dan konsistensi mengikuti prosedur. Hal ini menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan BMN tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, tetapi juga oleh kemampuan aparatur menerjemahkan ketentuan tersebut ke dalam praktik administrasi sehari-hari. Dalam konteks ini, penggunaan aplikasi SIMAN dan SAKTI turut memperkuat proses kepatuhan karena setiap perubahan dan informasi aset dapat didokumentasikan serta ditelusuri melalui sistem.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa kepatuhan aparatur belum sepenuhnya seragam pada seluruh unit kerja. Iwan Setiawan selaku Kepala Bagian Umum Universitas Riau mengungkapkan bahwa masih terdapat beberapa unit yang belum menerapkan mekanisme serah terima barang secara seragam. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prosedur formal yang telah ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya di tingkat unit kerja. Dengan kata lain, keberadaan regulasi dan prosedur belum secara otomatis menghasilkan keseragaman perilaku seluruh implementor.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat ketika terjadi peningkatan jumlah paket pengadaan pada akhir tahun anggaran. Hayis selaku Operator Aset dan Persediaan FISIP Universitas Riau menjelaskan:

"Kendala biasanya terjadi pada akhir tahun anggaran ketika jumlah paket pengadaan meningkat. Kondisi ini menyebabkan jadwal menjadi padat sehingga terdapat potensi keterlambatan input data dan koordinasi dengan unit pengguna." (Wawancara, 14 Mei 2026).

Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan aparatur tidak hanya berkaitan dengan kesadaran individu terhadap regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam menyediakan kondisi kerja yang mendukung. Peningkatan beban kerja, keterbatasan waktu, dan intensitas koordinasi dapat memengaruhi konsistensi pelaksanaan prosedur. Oleh karena itu, kepatuhan perlu dipahami sebagai hasil interaksi antara komitmen aparatur, dukungan pimpinan, pembagian tugas, dan ketersediaan sumber daya organisasi.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, temuan ini menunjukkan bahwa indikator *compliance* telah terpenuhi secara substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam aspek konsistensi pelaksanaan. Ripley dan Franklin menempatkan kepatuhan implementor terhadap ketentuan sebagai salah satu ukuran keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, kepatuhan terlihat melalui pelaksanaan prosedur pengadaan, penyerahan dokumen, pencatatan aset, dan inventarisasi. Namun, ketidakseragaman serah terima dan potensi keterlambatan pencatatan menunjukkan bahwa kepatuhan masih membutuhkan penguatan pengawasan dan standardisasi prosedur.

Jika dibandingkan dengan penelitian Suwito (2019) mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Binjai, terdapat persamaan dalam hal pentingnya kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, penelitian Suwito menemukan bahwa implementasi pengendalian belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi target yang ditentukan. Sementara itu, penelitian di Universitas Riau memperlihatkan bahwa sebagian besar prosedur administrasi pengelolaan aset telah dijalankan sesuai ketentuan, meskipun masih ditemukan ketidakkonsistenan pada beberapa unit kerja. Perbedaan ini menunjukkan bahwa kepatuhan implementor sangat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, mekanisme pengawasan, dan kompleksitas kegiatan yang dilaksanakan.

Temuan penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian Kristianti (2012) mengenai implementasi kebijakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh di Kelurahan Sei Lakam Timur. Penelitian tersebut menggunakan indikator implementasi Van Meter dan Van Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan Ripley dan Franklin. Meskipun objek dan kerangka teori yang

digunakan berbeda, kedua penelitian sama-sama menempatkan pelaksanaan ketentuan dan tanggung jawab implementor sebagai aspek penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Demikian pula dengan penelitian Astuti (2012) mengenai implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kota Pekalongan yang menemukan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada. Jika penelitian tersebut memperlihatkan keterbatasan pencapaian kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan substantif, penelitian di Universitas Riau menunjukkan bahwa kepatuhan prosedural telah terbentuk, tetapi masih menghadapi persoalan konsistensi administratif. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur merupakan kondisi penting, tetapi tetap memerlukan dukungan kapasitas organisasi agar menghasilkan implementasi yang optimal.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan aparatur dalam pengelolaan BMN di Universitas Riau telah menunjukkan perkembangan positif melalui penerapan prosedur, kelengkapan dokumen, dan pemanfaatan sistem informasi. Namun, tantangan berupa ketidakseragaman serah terima, peningkatan beban kerja, dan potensi keterlambatan pencatatan memperlihatkan bahwa penguatan kepatuhan tidak cukup dilakukan melalui regulasi, melainkan perlu didukung oleh standardisasi prosedur, pembinaan aparatur, dan pengawasan yang berkelanjutan.

2. Kelancaran Rutinitas dan Tidak Adanya Persoalan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau secara umum telah mendukung kelancaran aktivitas pengelolaan aset, terutama melalui koordinasi antaraktor, pemanfaatan sistem informasi, pelaksanaan inventarisasi, dan mekanisme serah terima barang. Kelancaran tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya prosedur administrasi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam membangun hubungan kerja antara pimpinan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pengelola aset, operator, dan unit pengguna barang.

Heru Purnomo selaku PPK LPMPP dan FMIPA Universitas Riau menyampaikan:

"Secara umum proses pengadaan berjalan lancar karena adanya koordinasi yang baik antara pimpinan, PPK, dan unit pengguna. Pimpinan selalu berkoordinasi dengan kami sehingga setiap tahapan pengadaan dapat diselesaikan sesuai kebutuhan unit." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koordinasi menjadi mekanisme penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan program. Pimpinan memiliki peran dalam mengarahkan kebutuhan organisasi, PPK menjalankan proses pengadaan, sedangkan unit pengguna memberikan informasi mengenai kebutuhan barang. Hubungan kerja tersebut memungkinkan proses pengadaan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit. Dengan demikian, kelancaran implementasi tidak hanya merupakan hasil pelaksanaan tugas individual, tetapi juga merupakan hasil koordinasi antaraktor dalam organisasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penjelasan Dr. Mahmud Alpusari selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FKIP Universitas Riau yang menyatakan:

"Koordinasi dalam pengelolaan aset dilakukan dengan melibatkan pimpinan fakultas, pengelola aset, operator, dan unit pengguna barang. Setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam proses pengadaan, penerimaan, pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset." (Wawancara, 19 Mei 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab merupakan fondasi dalam menciptakan kelancaran rutinitas pengelolaan aset. Proses pengelolaan BMN melibatkan beberapa tahapan yang saling berhubungan, sehingga keterlambatan pada satu tahapan dapat memengaruhi tahapan berikutnya. Oleh sebab itu, komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa proses penerimaan, pencatatan, inventarisasi, hingga pelaporan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Selain koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan program. Ozia Rahman Zhusto selaku Operator Aset LPMPP Universitas Riau mengungkapkan:

"Saat ini pencatatan aset dilakukan melalui beberapa aplikasi seperti SAKTI, SIMAN, dan aplikasi pendukung lainnya. Meskipun lebih kompleks dibanding sebelumnya, penggunaan sistem tersebut membantu proses pengelolaan aset menjadi lebih tertata dan memudahkan penelusuran data." (Wawancara, 9 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan aset telah memberikan kontribusi terhadap keteraturan administrasi dan kemudahan penelusuran informasi. Penggunaan beberapa aplikasi memungkinkan proses pencatatan dan pengelolaan data dilakukan secara lebih sistematis. Namun, kompleksitas penggunaan aplikasi juga menuntut kemampuan adaptasi dari operator yang bertanggung jawab dalam menjalankan sistem tersebut.

Dalam konteks ini, Hayis selaku Operator Aset dan Persediaan FISIP Universitas Riau menjelaskan:

"Perkembangan sistem merupakan hal yang wajar. Dulu pencatatan cukup dilakukan melalui satu aplikasi, tetapi sekarang harus menggunakan beberapa aplikasi sekaligus. Selama operator memahami alur kerja dan mendapatkan dukungan pelatihan, proses pengelolaan aset tetap dapat berjalan dengan baik." (Wawancara, 14 Mei 2026).

Keterangan tersebut mengindikasikan bahwa teknologi informasi tidak secara otomatis menjamin kelancaran implementasi. Efektivitas penggunaan sistem tetap bergantung pada kapasitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dengan demikian, digitalisasi dan kompetensi aparatur merupakan dua aspek yang saling melengkapi. Sistem informasi dapat menyediakan sarana pencatatan dan penelusuran data, tetapi kualitas pelaksanaannya tetap ditentukan oleh kemampuan operator dalam memahami prosedur dan menggunakan aplikasi secara tepat.

Meskipun secara umum berjalan lancar, penelitian ini menemukan beberapa persoalan yang masih memengaruhi pelaksanaan program. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan peningkatan volume pengadaan pada akhir tahun anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas sistem informasi, serta pergantian operator aset. Irawati Daulay selaku Operator Persediaan LPMPP Universitas Riau menyampaikan:

"Diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pengelolaan aset, terutama bagi operator baru. Selain itu, perlu adanya konsistensi penugasan agar operator tidak sering berganti sehingga proses pengelolaan aset dapat berjalan lebih efektif." (Wawancara, 21 Mei 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kesinambungan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran rutinitas pengelolaan aset. Pergantian operator tanpa disertai proses transfer pengetahuan berpotensi menghambat pelaksanaan administrasi karena operator baru membutuhkan waktu untuk memahami regulasi, alur kerja, dan sistem yang digunakan. Oleh karena itu, pelatihan dan konsistensi penugasan merupakan kebutuhan organisasi yang perlu diperhatikan.

Jika dikaitkan dengan indikator *smooth functioning of routine and absence of problems* menurut Ripley dan Franklin, hasil penelitian menunjukkan bahwa rutinitas implementasi program telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya terbebas dari persoalan. Koordinasi antarunit, penggunaan aplikasi, pencatatan, dan inventarisasi telah mendukung kelancaran pelaksanaan program. Akan tetapi, peningkatan beban kerja, keterbatasan personel, dan kompleksitas sistem masih menjadi hambatan yang memerlukan penanganan. Hal ini menunjukkan bahwa kelancaran implementasi tidak dapat hanya diukur dari berlangsungnya kegiatan administratif, tetapi juga dari kemampuan organisasi mempertahankan kesinambungan proses dan menyelesaikan persoalan yang muncul.

Temuan tersebut memiliki persamaan dengan penelitian Mesi Sulastri (2021) mengenai implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Baru Kecamatan Koto Baru Kota Sungai

Penuh. Penelitian tersebut menggunakan teori Ripley dan Franklin serta menunjukkan bahwa implementasi program melibatkan tahapan sosialisasi dan perencanaan yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Kesamaan kedua penelitian terletak pada pentingnya koordinasi dan keterlibatan aktor dalam mendukung pelaksanaan program. Namun, terdapat perbedaan pada karakteristik objek penelitian. Program KOTAKU berorientasi pada penanganan permukiman kumuh dengan keterlibatan masyarakat, sedangkan program manajemen aset di Universitas Riau lebih menekankan koordinasi internal organisasi, ketertiban administrasi, dan pemanfaatan sistem informasi.

Selanjutnya, temuan ini dapat dibandingkan dengan penelitian Indra (2017) mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan rumah sebagai penanganan kawasan permukiman kumuh. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan berjalan baik melalui koordinasi dan pelaksanaan kewenangan yang efektif. Kesamaan dengan penelitian di Universitas Riau terlihat pada pentingnya koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antaraktor. Namun, penelitian ini memberikan penekanan tambahan bahwa koordinasi yang baik tetap perlu didukung oleh kompetensi operator, stabilitas sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan aplikasi pengelolaan aset.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperluas pemahaman mengenai indikator kelancaran rutinitas dalam teori Ripley dan Franklin. Kelancaran implementasi program manajemen aset tidak hanya ditentukan oleh koordinasi dan pembagian tugas, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kesinambungan penugasan, dan kemampuan organisasi beradaptasi dengan perubahan sistem informasi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan rutinitas administrasi memerlukan dukungan kelembagaan yang konsisten agar persoalan operasional tidak berkembang menjadi hambatan implementasi yang lebih luas.

3. Kinerja Implementasi Program Manajemen Aset di Lingkungan Universitas Riau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau telah memberikan sejumlah hasil positif terhadap peningkatan kualitas administrasi, akurasi data, efektivitas inventarisasi, kualitas pelaporan, serta efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Kinerja implementasi program tidak hanya terlihat dari terlaksananya prosedur pengelolaan aset, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi unit kerja dalam mendukung kegiatan akademik dan administrasi.

Salah satu capaian yang ditemukan adalah meningkatnya keteraturan data aset melalui pemanfaatan sistem informasi. Susi Heptariani selaku Kepala Bagian TU FISIP Universitas Riau menyampaikan:

"Penerapan sistem pengelolaan aset menghasilkan data aset yang lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik. Setiap aset yang diterima dapat dicatat dan dipantau sehingga memudahkan proses inventarisasi serta penyusunan laporan aset." (Wawancara, 16 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengelolaan aset telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas administrasi. Data aset yang tersusun secara sistematis memudahkan organisasi dalam mengetahui keberadaan dan kondisi barang, sekaligus mendukung proses inventarisasi serta penyusunan laporan. Dengan demikian, hasil implementasi program tidak hanya berupa terlaksananya kegiatan pencatatan, tetapi juga tersedianya informasi aset yang dapat digunakan untuk kepentingan pengawasan dan pengambilan keputusan.

Peningkatan kualitas data juga terlihat dari penggunaan aplikasi pengelolaan aset. Ozia Rahman Zhusto selaku Operator Aset LPMPP Universitas Riau menjelaskan:

"Penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan SIMAN membantu meningkatkan akurasi data aset karena setiap perubahan data dapat langsung diperbarui dalam sistem. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan mempermudah proses penelusuran aset." (Wawancara, 9 Mei 2026).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan teknologi informasi telah mendukung peningkatan akurasi dan kemutakhiran data aset. Kemampuan memperbarui informasi dalam sistem

membantu mengurangi perbedaan antara data administrasi dan kondisi aset yang sebenarnya. Ketersediaan data yang akurat menjadi penting karena informasi tersebut dapat digunakan untuk mendukung inventarisasi, pengawasan, audit, serta perencanaan kebutuhan barang pada periode berikutnya.

Selain meningkatkan kualitas administrasi, implementasi program manajemen aset juga memberikan kontribusi terhadap kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Septriawan Gustika selaku Kepala Bagian FMIPA Universitas Riau menyampaikan:

"Pengelolaan aset yang tertib menghasilkan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data aset yang valid mempermudah penyusunan laporan keuangan dan mendukung kelancaran proses audit." (Wawancara, 19 Mei 2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan hubungan antara tertib administrasi aset dan kualitas akuntabilitas keuangan organisasi. Data aset yang valid dan terdokumentasi dengan baik menjadi bagian penting dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, ketersediaan informasi yang dapat ditelusuri memudahkan proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Dengan demikian, keberhasilan manajemen aset tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelola barang, tetapi juga mendukung tata kelola keuangan organisasi secara lebih luas.

Kinerja implementasi juga terlihat dari kesesuaian hasil pengadaan dengan kebutuhan unit kerja. Heru Purnomo selaku PPK LPMPP dan FMIPA Universitas Riau menjelaskan:

"Secara umum, output pengadaan telah sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan unit kerja. Barang yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan." (Wawancara, 5 Mei 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa program manajemen aset telah memberikan manfaat dalam pemenuhan kebutuhan organisasi. Kesesuaian antara perencanaan dan hasil pengadaan menjadi salah satu aspek penting dalam menilai efektivitas pengelolaan aset karena barang yang diperoleh harus memiliki relevansi dengan kebutuhan aktual unit kerja. Aset yang sesuai dengan kebutuhan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, sehingga pengadaan tidak hanya menghasilkan barang, tetapi juga memberikan nilai guna bagi kegiatan akademik dan administrasi.

Lebih lanjut, kinerja implementasi program terlihat dari kontribusinya terhadap efisiensi penggunaan anggaran. Dr. Mahmud Alpusari selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum FKIP Universitas Riau menjelaskan:

"Pengelolaan aset yang tertib dapat membantu fakultas dalam merencanakan kebutuhan barang secara lebih tepat. Dengan adanya data mengenai jumlah, kondisi, dan ketersediaan aset, kami dapat mengetahui barang yang masih dapat digunakan dan barang yang memang perlu dilakukan pengadaan. Hal ini penting agar penggunaan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang sebenarnya." (Wawancara, 19 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa data aset memiliki fungsi strategis dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ketersediaan informasi mengenai jumlah, kondisi, dan lokasi aset memungkinkan organisasi mengidentifikasi kebutuhan secara lebih rasional. Dengan demikian, pengadaan dapat diarahkan pada barang yang benar-benar diperlukan, sementara aset yang masih layak digunakan dapat dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen aset tidak hanya berorientasi pada tertib pencatatan, tetapi juga memiliki hubungan dengan efisiensi penggunaan anggaran dan optimalisasi sumber daya organisasi.

Temuan lain yang memperlihatkan kinerja program adalah penerapan inventarisasi dan pelabelan aset. Aidissilim selaku Ketua Pokja Umum dan Sarana Akademik FMIPA Universitas Riau menyatakan:

"Inventarisasi dan pelabelan aset sangat membantu proses pengawasan karena setiap barang memiliki identitas yang jelas. Dengan adanya barcode atau kode inventaris, aset menjadi lebih mudah dilacak dan diawasi." (Wawancara, 27 Mei 2026).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemberian barcode atau kode inventaris telah mendukung penguatan fungsi pengawasan aset. Identitas yang melekat pada setiap barang memudahkan proses identifikasi dan penelusuran, sehingga pengelola dapat mengetahui keberadaan aset secara lebih terstruktur. Mekanisme ini memberikan kontribusi terhadap pengendalian internal karena membantu mengurangi risiko aset yang tidak tercatat, ketidakjelasan lokasi, dan kesulitan dalam proses pemeriksaan fisik.

Jika dikaitkan dengan indikator *performance* menurut Ripley dan Franklin, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi program manajemen aset telah menghasilkan manfaat yang dapat diamati pada tingkat organisasi. Manfaat tersebut meliputi peningkatan keteraturan data, akurasi pencatatan, kemudahan inventarisasi, kualitas pelaporan, kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, kinerja implementasi tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga berdasarkan sejauh mana program menghasilkan perubahan positif dalam praktik pengelolaan aset.

Apabila dibandingkan dengan penelitian Suwito (2019), penelitian ini memperlihatkan perbedaan pada capaian implementasi. Suwito menemukan bahwa implementasi pengendalian belum terlaksana dengan baik dan belum memenuhi target yang ditentukan. Sebaliknya, penelitian di Universitas Riau menunjukkan adanya sejumlah hasil positif dalam pengelolaan aset, khususnya pada aspek pencatatan digital, inventarisasi, dan pelaporan. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa capaian kinerja implementasi dapat dipengaruhi oleh mekanisme pelaksanaan, dukungan organisasi, serta karakteristik kebijakan yang diimplementasikan.

Temuan ini juga memiliki hubungan dengan penelitian Astuti (2012) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Kedua penelitian sama-sama memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup dinilai dari terlaksananya kegiatan atau program secara administratif, tetapi juga perlu dilihat dari hasil dan manfaat yang dihasilkan. Perbedaannya, penelitian di Universitas Riau memperlihatkan manfaat yang lebih spesifik pada peningkatan kualitas data, administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan aset.

Sementara itu, penelitian Indra (2017) menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan rumah susun berjalan efektif melalui koordinasi dan pelaksanaan kewenangan yang baik. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa koordinasi antaraktor merupakan faktor penting dalam menghasilkan kinerja implementasi. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja program manajemen aset memiliki dimensi yang lebih luas, karena selain koordinasi, pencapaian program juga ditentukan oleh kualitas data, pemanfaatan teknologi informasi, inventarisasi, dan ketepatan perencanaan kebutuhan aset.

Adapun penelitian Mesi Sulastri (2021) yang menggunakan teori Ripley dan Franklin memperlihatkan bahwa implementasi Program KOTAKU dilaksanakan melalui tahapan sosialisasi dan perencanaan dengan melibatkan masyarakat. Kesamaan penggunaan teori tersebut memberikan relevansi dalam memahami implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga pada pencapaian hasil. Meskipun demikian, penelitian ini memperlihatkan karakteristik implementasi yang berbeda karena keberhasilan program manajemen aset di lingkungan perguruan tinggi lebih berkaitan dengan tertib administrasi, akurasi data, pengendalian internal, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya negara.

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa kinerja implementasi program manajemen aset di Universitas Riau telah menghasilkan manfaat administratif dan organisatoris yang nyata. Namun, capaian tersebut belum dapat dimaknai sebagai kondisi yang sepenuhnya optimal karena masih terdapat persoalan konsistensi prosedur, beban kerja, dan kapasitas sumber daya manusia. Dengan

demikian, kinerja implementasi perlu dipahami sebagai proses yang terus berkembang dan membutuhkan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan manfaat program dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Berdasarkan ketiga indikator implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, penelitian ini menemukan bahwa implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau telah menunjukkan perkembangan positif, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek konsistensi pelaksanaan dan kapasitas organisasi. Tingkat kepatuhan aparatur terlihat dari penerapan prosedur pengadaan, pencatatan, dan inventarisasi aset. Kelancaran rutinitas didukung oleh koordinasi antarunit serta pemanfaatan sistem informasi, sedangkan kinerja program tercermin dari peningkatan keteraturan data, akurasi pencatatan, kualitas pelaporan, dan dukungan terhadap efisiensi anggaran.

Ketiga indikator tersebut memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Kepatuhan aparatur menjadi landasan bagi pelaksanaan prosedur pengelolaan aset. Kepatuhan tersebut kemudian mendukung kelancaran rutinitas administrasi melalui koordinasi, pembagian tugas, dan penggunaan sistem informasi. Selanjutnya, pelaksanaan yang tertib dan berkelanjutan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja berupa data aset yang lebih akurat, pengawasan yang lebih mudah, serta perencanaan kebutuhan barang yang lebih tepat.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kepatuhan formal belum selalu diikuti oleh keseragaman praktik di seluruh unit kerja. Demikian pula, penggunaan teknologi informasi belum sepenuhnya menghilangkan persoalan operasional karena masih dibutuhkan peningkatan kompetensi operator dan kesinambungan penugasan. Artinya, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi dan aplikasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi mengintegrasikan aspek sumber daya manusia, koordinasi, dan pengendalian administrasi.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, kontribusi penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai implementasi manajemen aset sebagai proses administratif dan organisatoris yang saling terhubung. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori implementasi kebijakan lebih banyak membahas kebijakan pengendalian perumahan, penanganan permukiman kumuh, dan program pembangunan berbasis masyarakat. Sementara itu, penelitian ini memperlihatkan bagaimana indikator Ripley dan Franklin dapat digunakan untuk menganalisis implementasi program penatausahaan BMN dalam organisasi perguruan tinggi, terutama melalui hubungan antara kepatuhan prosedural, kelancaran koordinasi, pemanfaatan sistem informasi, dan pencapaian kinerja pengelolaan aset.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan pemahaman bahwa efektivitas implementasi program manajemen aset tidak cukup diukur dari tersedianya regulasi, prosedur, maupun aplikasi pengelolaan aset. Efektivitas tersebut juga ditentukan oleh konsistensi aparatur dalam menjalankan ketentuan, kemampuan organisasi menjaga kelancaran rutinitas, serta manfaat yang dihasilkan bagi akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, penguatan standardisasi prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, stabilitas penugasan operator, dan evaluasi berkala menjadi langkah penting untuk meningkatkan keberlanjutan implementasi program manajemen aset di lingkungan Universitas Riau.

B. Faktor Penghambat Implementasi Program Manajemen Aset di Lingkungan Universitas Riau

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Manajemen Aset di lingkungan Universitas Riau masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), permasalahan administrasi dan sistem pengelolaan aset, serta kendala dalam proses penghapusan dan ketersediaan sarana pendukung.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Ripley dan Franklin, hambatan tersebut berkaitan dengan kelancaran rutinitas pelaksanaan program dan pencapaian kinerja implementasi. Keberadaan regulasi dan sistem pengelolaan belum sepenuhnya menjamin keberhasilan program apabila tidak didukung kapasitas

organisasi dan kesiapan aparatur yang memadai. Ketiga faktor penghambat tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Keterbatasan Kemampuan dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Keterbatasan kemampuan dan kapasitas SDM menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi Program Manajemen Aset di Universitas Riau. Permasalahan ini terlihat dari jumlah personel yang belum sebanding dengan volume pekerjaan, beban kerja rangkap, pergantian operator, serta belum meratanya kompetensi teknis dalam pengoperasian aplikasi pengelolaan aset.

Susi Heptariani, S.E., M.Ak., selaku Kepala Bagian TU FISIP Universitas Riau, menjelaskan bahwa keterbatasan jumlah petugas menyebabkan beberapa pegawai harus menangani lebih dari satu pekerjaan sehingga beban kerja menjadi tinggi (Wawancara, 16 Mei 2026). Kondisi serupa disampaikan Ozia Rahman Zhusto, Operator Aset LPMPP, yang menyebutkan bahwa banyaknya pekerjaan administratif dan perubahan aplikasi menuntut operator untuk terus menyesuaikan diri (Wawancara, 9 Mei 2026).

Selain itu, pergantian operator dapat mengganggu kesinambungan pekerjaan karena petugas baru membutuhkan waktu untuk memahami prosedur dan sistem yang digunakan. Irawati Daulay, Operator Persediaan LPMPP, menjelaskan bahwa pergantian personel yang terlalu sering dapat menyebabkan proses administrasi menjadi kurang optimal (Wawancara, 21 Mei 2026). Sementara itu, Hayis, S.AP., Operator Aset dan Persediaan FISIP, menegaskan bahwa penguasaan aplikasi SAKTI dan SIMAN membutuhkan kompetensi teknis serta pelatihan yang memadai untuk menghindari kesalahan penginputan data (Wawancara, 14 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa hambatan SDM tidak hanya berkaitan dengan kuantitas personel, tetapi juga kualitas kompetensi dan kesinambungan penugasan. Dalam perspektif Ripley dan Franklin, kondisi ini memengaruhi kelancaran rutinitas pelaksanaan program karena keterbatasan kapasitas aparatur dapat memperlambat pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan aset.

Meskipun demikian, Universitas Riau telah melakukan sejumlah upaya perbaikan. Rahmad Hendra, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, menjelaskan adanya dorongan untuk mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan. Aidissilim, S.Pd., selaku Ketua Pokja Umum dan Sarana Akademik FMIPA, juga menekankan perlunya penambahan personel khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penetapan operator tetap (Wawancara, 5 Mei 2026 dan 27 Mei 2026).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Suwito (2019) dan Astuti (2012) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih dapat menghadapi kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kondisi pelaksanaannya. Namun, penelitian ini memberikan penekanan lebih spesifik pada kapasitas aparatur, distribusi beban kerja, dan kontinuitas operator dalam pengelolaan BMN di lingkungan perguruan tinggi negeri. Dengan demikian, penguatan SDM perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi, penyesuaian jumlah personel, pembagian tugas yang proporsional, dan kesinambungan penugasan.

2. Permasalahan Administrasi dan Sistem Pengelolaan Aset

Faktor kedua adalah permasalahan administrasi dan sistem pengelolaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan tersebut meliputi keterlambatan dokumen pendukung, penggunaan beberapa aplikasi secara bersamaan, ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset, serta keterlambatan pembaruan informasi dalam sistem.

Susi Heptariani menjelaskan bahwa keterlambatan penyampaian dokumen, seperti berita acara serah terima dan dokumen pengadaan, sering menghambat proses pencatatan serta pelaporan aset (Wawancara, 16 Mei 2026). Selain itu, Ozia Rahman Zhusto mengungkapkan bahwa penggunaan aplikasi SAKTI dan SIMAN secara bersamaan meningkatkan kompleksitas pekerjaan karena operator harus melakukan penginputan dan memastikan kesesuaian data antaraplikasi (Wawancara, 9 Mei 2026).

Permasalahan tersebut diperkuat oleh keterangan Hayis, S.AP., yang menyebutkan bahwa keterlambatan penginputan dan ketidaklengkapan dokumen dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara

data administrasi dan kondisi aset sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan verifikasi dan rekonsiliasi data secara berkala (Wawancara, 14 Mei 2026). Irawati Daulay juga menjelaskan bahwa perubahan regulasi dan pembaruan aplikasi menuntut operator untuk terus menyesuaikan diri melalui sosialisasi dan pelatihan yang memadai (Wawancara, 21 Mei 2026).

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan administrasi pengelolaan aset. Penggunaan beberapa aplikasi tanpa integrasi yang optimal justru dapat meningkatkan beban pekerjaan dan risiko ketidaksesuaian data. Selain itu, keterlambatan dokumen dan pembaruan informasi dapat memengaruhi akurasi pencatatan serta efektivitas pengawasan aset.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, koordinasi antarunit menjadi mekanisme penting. Iwan Setiawan, S.T., selaku Kepala Bagian Umum Universitas Riau, menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui rapat rutin, rekonsiliasi data, dan komunikasi antara pengelola aset, operator, serta unit pengguna barang (Wawancara, 12 Mei 2026). Aidissilim, S.Pd., menambahkan bahwa inventarisasi rutin dan penggunaan barcode membantu pengawasan aset, meskipun pembaruan data secara tepat waktu masih menjadi kebutuhan (Wawancara, 27 Mei 2026).

Apabila dikaitkan dengan perspektif Ripley dan Franklin, persoalan administrasi dan sistem tersebut menunjukkan adanya kendala dalam mempertahankan kelancaran rutinitas pelaksanaan program. Keberhasilan pengelolaan aset tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada ketertiban dokumen, koordinasi antarunit, dan konsistensi pembaruan data.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Fiky Indra (2017) mengenai pentingnya kewenangan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Penelitian Mesi Sulastri (2021) juga memperlihatkan pentingnya sosialisasi dan perencanaan dalam pelaksanaan program. Namun, penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan menunjukkan bahwa koordinasi, sosialisasi, dan kesiapan sistem informasi merupakan faktor penting dalam menjaga ketertiban administrasi pengelolaan BMN. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi prosedur, peningkatan koordinasi, penguatan kompetensi operator, dan integrasi sistem informasi.

3. Permasalahan Penghapusan dan Sarana Pendukung Aset

Faktor ketiga adalah kendala dalam proses penghapusan dan keterbatasan sarana pendukung aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan membutuhkan waktu relatif lama karena harus melalui tahapan verifikasi fisik, kelengkapan dokumen, dan persetujuan berbagai pihak. Di sisi lain, kegiatan inventarisasi, pelabelan, penyimpanan, dan pengawasan juga membutuhkan fasilitas operasional yang memadai.

Susi Heptariani menjelaskan bahwa panjangnya tahapan administrasi menjadi kendala utama dalam proses penghapusan aset (Wawancara, 16 Mei 2026). Hal tersebut berdampak pada ketepatan informasi aset karena barang yang secara fisik sudah rusak atau tidak digunakan masih dapat tercatat dalam administrasi sebagai aset aktif. Heru Purnomo, S.Si., M.Si., selaku PPK LPMPP dan FMIPA Universitas Riau, menegaskan bahwa lambatnya proses penghapusan menyebabkan data aset belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, koordinasi antara unit pengguna, pengelola aset, dan pihak terkait perlu diperkuat (Wawancara, 5 Mei 2026).

Selain persoalan penghapusan, keterbatasan sarana seperti komputer, printer barcode, jaringan internet, dan ruang penyimpanan juga memengaruhi kelancaran kegiatan pengelolaan aset. Iwan Setiawan menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan meliputi pengadaan sarana secara bertahap, pemeliharaan perangkat, dan koordinasi antarunit sesuai kebutuhan operasional (Wawancara, 12 Mei 2026).

Septriawan Gustika, S.E., Ak., selaku Kepala Bagian FMIPA Universitas Riau, juga menekankan perlunya penyederhanaan prosedur penghapusan sesuai ketentuan, peningkatan koordinasi, pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi, serta penyediaan ruang penyimpanan dan perangkat inventarisasi yang memadai (Wawancara, 19 Mei 2026).

Dalam perspektif Ripley dan Franklin, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa kelancaran implementasi program dipengaruhi oleh kemampuan organisasi menyelesaikan seluruh tahapan pengelolaan aset secara konsisten. Proses penghapusan yang lambat dapat menghambat pemutakhiran data, sedangkan keterbatasan sarana dapat mengurangi efektivitas inventarisasi dan pengawasan. Dengan demikian, hambatan tidak hanya muncul pada tahap pencatatan, tetapi juga pada tahap pemeliharaan dan pengakhiran siklus pengelolaan aset.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Fiky Indra (2017) mengenai pentingnya koordinasi dalam implementasi kebijakan. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi juga menentukan kelancaran proses penghapusan aset yang melibatkan berbagai unit dan pihak berwenang. Sementara itu, penelitian Suwito (2019), Astuti (2012), dan Mesi Sulastri (2021) memberikan pembanding mengenai berbagai hambatan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, perencanaan, dan keterlibatan pihak-pihak terkait.

Berdasarkan temuan tersebut, perbaikan perlu diarahkan pada peningkatan koordinasi, penyederhanaan prosedur tanpa mengabaikan ketentuan penghapusan BMN, percepatan verifikasi dan penyelesaian administrasi, serta pemenuhan sarana berdasarkan kebutuhan operasional masing-masing unit kerja.

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan implementasi Program Manajemen Aset di Universitas Riau bersifat saling berkaitan. Keterbatasan SDM memengaruhi ketepatan dan kecepatan pekerjaan administratif, permasalahan administrasi dan sistem menyebabkan keterlambatan serta ketidaksesuaian data, sedangkan proses penghapusan yang panjang dan keterbatasan sarana menghambat pemutakhiran informasi serta pengawasan aset. Dalam perspektif Ripley dan Franklin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, prosedur, dan sistem informasi belum sepenuhnya menjamin kelancaran rutinitas pelaksanaan maupun pencapaian kinerja program. Persoalan utama justru terlihat pada kapasitas organisasi dalam menerjemahkan ketentuan kebijakan ke dalam praktik pengelolaan aset sehari-hari.

Kontribusi penelitian ini terletak pada identifikasi keterkaitan antara kapasitas aparatur, ketertiban administrasi, sistem informasi, proses penghapusan, dan ketersediaan sarana dalam implementasi manajemen BMN di lingkungan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas SDM, standardisasi administrasi, integrasi sistem informasi, perbaikan proses penghapusan sesuai ketentuan, serta pemenuhan sarana pendukung. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan aset Universitas Riau yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Manajemen Aset di Lingkungan Universitas Riau, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Manajemen Aset di Universitas Riau secara umum telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya kepatuhan aparatur dalam melaksanakan prosedur pengadaan, pencatatan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan program juga didukung oleh koordinasi antara pimpinan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), operator aset, pengelola barang, serta unit pengguna aset. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi dan komunikasi antaraparatur menjadi faktor penting dalam memastikan setiap aset yang diperoleh dapat dicatat, digunakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu, penggunaan aplikasi pengelolaan aset seperti SAKTI dan SIMAN membantu menciptakan administrasi aset yang lebih tertata,

transparan, dan akuntabel. Kepatuhan aparatur terhadap prosedur pengelolaan aset juga berkontribusi dalam menghasilkan data aset yang dapat ditelusuri serta mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan atau audit. Dengan demikian, implementasi program manajemen aset telah mendukung terciptanya pengelolaan aset yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas publik.

2. Faktor penghambat dalam implementasi Program Manajemen Aset di Universitas Riau antara lain meningkatnya jumlah paket pengadaan pada akhir tahun anggaran yang menyebabkan tingginya beban kerja aparatur, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan aset. Selain itu, koordinasi antara pengelola aset dengan unit pengguna belum selalu berjalan secara optimal, khususnya dalam proses serah terima dan penyampaian dokumen pendukung aset. Penerapan prosedur serah terima aset juga belum sepenuhnya seragam pada seluruh unit kerja. Hambatan lainnya adalah kompleksitas penggunaan beberapa aplikasi pengelolaan aset yang menuntut aparatur memiliki kemampuan teknis dan pemahaman yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program masih dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, konsistensi penugasan operator aset, serta beban kerja pada periode tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur, konsistensi penugasan operator aset, peningkatan koordinasi antarunit, standarisasi prosedur serah terima aset, serta perencanaan pengadaan yang lebih merata sepanjang tahun anggaran. Upaya tersebut diperlukan agar implementasi Program Manajemen Aset di Universitas Riau dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Universitas Riau perlu meningkatkan standarisasi prosedur pengelolaan aset, khususnya dalam mekanisme serah terima barang dan perpindahan aset agar seluruh unit kerja menerapkan prosedur yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berkala terkait pengelolaan aset serta penggunaan aplikasi SAKTI, SIMAN, dan sistem pendukung lainnya.
3. Pimpinan unit kerja perlu memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan aset serta menjaga konsistensi penugasan operator aset agar tidak terjadi pergantian personel yang terlalu sering.
4. Universitas Riau perlu melakukan perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur dan merata sepanjang tahun anggaran guna mengurangi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun yang berpotensi menghambat proses pencatatan dan pelaporan aset.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji aspek lain dalam manajemen aset, seperti pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset, serta menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

[1]. Abdul Wahab, Solichin. 2001. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: Universitas Negeri Malang Press
[2]. Agustinus, L. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
[3]. Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: RinekaCipta
[4]. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Universitas Riau.
[5]. Bridgmen, J& Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW
[6]. Dale, Reidar. (2004). Evaluating Devolopment Programmes and Project. Sage Publications India Pvt Ltd. India.
[7]. Dehani, M., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi, 4(1), 45-56.
[8]. Domai, Tjahjanulin. 2010. Desentralisasi dan Perencanaan Pembangunan. Malang : Lab Administrasi Pemerintahan FIA UB.
[9]. Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
[10]. Edwards, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
[11]. Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis evaluasi program kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK), 4(4), 686-692.
[12]. Gavrikova, E., et al. (2020). Strategic Aspects of Asset Management: An Overview. Sustainability, 12(15), 5955. doi:10.3390/su12155955.
[13]. Grindle, M. S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
[14]. Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi). Bogor : Ghalia Indonesia.
[15]. Harakan, a., prianto, a. L., & khaerah, n. (2019). Strategi pemerintah daerah dalam pengembangan pelayanan berbasis e- government di kabupaten muna. 64–78.
[16]. Kadji, Y. (2015). FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG.
[17]. Kaganova, O., & McKellar, M. (2011). Asset Management in Public Sector Organizations.
[18]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara.
[19]. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Petunjuk Teknis SIMAK-BMN dan SAIBA.
[20]. Kunarjo. 2002. Perencanaandan Pengendalian Program Pembangunan. Jakarta: Universitas Indonesia Press
[21]. Lu, S. (2011). Strategic Asset Management: A Framework for Managing Public Infrastructure Assets.
[22]. Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and Public Policy. Glenview: Scott, Foresman and Company.
[23]. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
[24]. Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
[25]. Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
[26]. Rifawanda, D., & Mayarni, M. (2024). Implementasi Program Smart Card Blu-E dalam Pelayanan Kir di Kota Pekanbaru. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2(3), 357-369.
[27]. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2004. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama.
[28]. Robiah, R., Hendarman, H., & Hidayat, R. (2023). Evaluasi Program Literasi Anak dengan Pendekatan Model CIPPO. Murhum: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 4(1), 528-539.
[29]. Sayekti, L. A. (2019). Evaluasi program desa mandiri energi berbasis biogas di desa mekarjaya. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 7(2), 26-41.
[30]. Setiawan, Beni. 2007. Direktorat Pemantauan Dan Evaluasi Bapenas. Jakarta:Bapenas
[31]. Setiawan, R., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2023). Implementasi Program Ketahanan Pangan. FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 21(1).
[32]. Simatupang, A. (2019). Tantangan dan Solusi Pengadaan Digital di Instansi Pemerintah. Jurnal Reformasi Birokrasi, 3(2), 78–90.
[33]. Subarsono, AG. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
[34]. Sudjana, Djudju. 2006. Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
[35]. Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[36]. Sujianto, Ernawati, Hasim As'ari, Mayarni. 2012. Implementasi Program Raskin dalam Upaya. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 2.
[37]. Sulistyo, A. (2017). Evaluasi program budaya membaca di sekolah dasar negeri. Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan, 4(1), 48-58.
[38]. Tayibnabis, Farida Yusuf. 2000. Konsep Model Evaluasi Implementasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
[39]. Too, E.G., & Too, L. (2010). Strategic Infrastructure Asset Management: A Conceptual Framework to Identify Capabilities. Journal of Corporate Real Estate, 12(3), 196-208.
[40]. Ulfa, A., & Mashur, D. (2022). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Retribusi. Cross-Border Journal of Business Management, 5(1), 862-875
[41]. Universitas Riau. (2022). Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Riau. Pekanbaru: Biro Umum dan Keuangan UNRI.
[42]. Universitas Riau. (2023). Laporan Audit Internal dan Evaluasi Pengelolaan BMN.
[43]. Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." Administration and Society, 6(4), 445–488.
[44]. Wahyu, M., & Adianto, A. (2022). Efektivitas Implementasi Program Pupuk Bersubsidi Oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Studi Kasus Kelompok Tani Kecamatan Tualang). Cross-border, 5(1), 848-861.
[45]. Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
[46]. Yanti, D., & Adianto, A. (2022). Implementasi Strategi Pengembangan Program Kota Sehat Melalui Kawasan Masyarakat Sehat Yang Mandiri Di Kabupaten Rokan Hulu. Journal of Research and Development on Public Policy, 1(4), 47-58.
[47]. Zauhar, Soesilo. 1993. Administrasi Program dan Proyek Pembangunan. Malang: IKIP Malang